

## Gempa Turki, Seorang WNI Bersama Anak dan Suami Tewas Tertimbun

JAKARTA (IM) - Kedu-taan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara, Turki, melaporkan, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Nia Marlinda tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 di Turki.

WNI asal Bali tersebut tewas bersama anaknya yang berusia 1 tahun dan suami berkebangsaan Turki, di Kahramanmaras.

“Satu WNI (atas nama Nia Marlinda) asal Bali dan seorang anak berusia 1 tahun serta suami WN Turki di Kahramanmaras ditemukan meninggal dunia karena tertimbun reruntuhan,” tulis KBRI Ankara dalam keterangan resmi, Rabu (8/2).

KBRI menyebut, Atase Pertahanan RI KBRI Ankara, Kolonel Amir, yang memimpin tim evakuasi ke Kahramanmaras. Ia telah memastikan pemulasaraan almarhumah. WNI dan suami serta anaknya dimakamkan di Kahramanmaras, Turki, Rabu (8/2).

“KBRI telah mengomunikasikan hal tersebut ke-

pada keluarga almarhumah. Almarhumah dan keluarga dimakamkan hari ini (Rabu) di Kahramanmaras,” sebut KBRI Ankara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat, terdapat 10 warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami luka-luka gempa bumi bermagnitudo 7,8 di selatan Turki, Provinsi Kahramanmaras, Gaziantep, Osmaniye.

Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan, enam WNI di antaranya sedang dievakuasi, dan empat di antaranya sudah menjalani perawatan medis.

Sebagai informasi, gempa berkekuatan M 7,8 mengguncang Turki bagian selatan pada Senin (6/2) pukul 4.17 WS (8.17 WIB). Pusat gempa terjadi di Provinsi Kahramanmaras, sekitar 600 km sebelah tenggara Ankara. Disusul dua gempa lanjutan berkekuatan M 6,4 dan M 6,5 di Provinsi Gaziantep, sekitar 700 km sebelah tenggara Ankara.

● han

## Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan dari Tuntutan

JAKARTA (IM) - Tim penasihat hukum terdakwa Baiquni Wibowo meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), terkait kasus *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Koordinator tim penasihat hukum Baiquni Wibowo, Junaedi Saibih berpandangan, tindakan kliennya dalam perkara perintangan penyidikan tidak seperti yang disebutkan JPU dalam replik atau tanggapan atas pleidoi yang telah disampaikan pada Senin (6/2/).

Junaedi Saibih mengatakan bahwa Baiquni Wibowo telah konsisten dan kooperatif dalam memberikan keterangan, berkata jujur dari awal proses penyidikan hingga pada saat persidangan ini berjalan.

“Tidak pernah ada upaya merintangi penyidikan sehingga tuduhan merintangi penyidikan sangatlah tidak konkrit dan tidak berdasar,” ujar Junaedi Saibih dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (8/2).

“Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan aquo dan replik aquo,” ucapnya.

Selain itu, Tim penasihat hukum Eks Kepala Sub Bagian Pemeriksaan (Kasubagrik) Bagian Pengawasan Etika (Baggaketika) Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri itu, juga meminta supaya harkat dan martabat kliennya dipulihkan.

Kubu Baiquni Wibowo meminta majelis hakim mempertimbangkan hal yang dapat meringankan hukuman. Misalnya, belum pernah dihukum, telah menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga. Mantan anak buah Ferdy Sambo itu juga disebut sudah jujur dan sopan selama persidangan.

“Selama dalam proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik,” ucap Junaedi Saibih. ● mei



FOTO: ANI

**SIDANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**  
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kanan) didampingi anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo (kiri) memimpin sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2). Sidang KEPP itu beragendakan mendengarkan keterangan pengadu dan teradu yang salah satunya anggota KPU RI Idham Holik.

## Dua Oknum TNI di Pontianak Bawa Sabu 20 Kg, Ditetapkan Tersangka

PONTIANAK (IM) - Dua anggota TNI berinisial T dan AM di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan 20 kilogram narkoba jenis sabu. Kasus ini tengah ditangani Pomdam XII Tanjung Pura.

“Sudah sebagai tersangka sejak kemarin,” ujar Kapendam XII/Tanjung Pura Kolonel Inf Ade Rizal Muhrarman kepada wartawan, Rabu (8/2).

Ade tidak menjelaskan lebih lanjut terkait proses penyidikan kedua tersangka. Namun dia mengungkapkan ada potensi tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Belum selesai. Penyidik masih tertutup, lagi mengembangkan kemungkinan ada tersangka lainnya,” ujarnya.

Selain tersangka T dan AM, ternyata ada warga sipil yang ikut terlibat atas kasus kepemilikan 20 kg sabu itu. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan kedua tersangka. “Pengakuan kedua oknum (ada warga sipil ikut terlibat),” ujar Ade.

Kedua oknum anggota TNI ditangkap di wilayah Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Minggu (5/2). Keduanya ditangkap polisi saat membawa 20 kilogram sabu.

Keduanya langsung diserahkan ke polisi militer untuk diperiksa. Sementara barang bukti diproses Ditreskoba Polda Kalbar untuk uji lab. “Soal itu sudah kami serahkan ke Pomdam,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Raden Petit Wijaya saat dihubungi, Senin (6/2). ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## RAPAT KERJA MENKES DENGAN KOMISI IX DPR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). Rapat tersebut membahas strategi percepatan penanganan penyakit tidak menular dan penyakit menular.

# TII Pertanyakan Sikap Mahfud MD yang Seakan Tak Percaya soal IPK Indonesia 2022

Selama ini skor IPK Indonesia menjadi panduan buat menilai kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang seolah tidak mempercayai hasil skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2022.

“Hasil tidak percaya jika skor jeblok, tetapi komentar serupa tidak muncul di tahun-tahun sebelumnya ketika skor

bagus,” kata Danang saat dihubungi wartawan, Rabu (8/2).

Dari data Transparency International, IPK mulai diterapkan di Indonesia sejak 2012. Skor IPK Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu adalah 32 (2012-2013).

Kemudian, pada 2014, skor IPK Indonesia mencapai 34. Setahun kemudian skor itu naik lagi menjadi 36. Kemu-

dian pada 2016-2017, skor IPK Indonesia mencapai 37, hingga pada 2019, Indonesia mencatatkan skor IPK tertinggi yakni 40.

Namun, tahun berikutnya IPK Indonesia turun menjadi 37. Lantas pada 2021, IPK Indonesia naik menjadi 38. Lalu pada 2022 kembali turun menjadi 34.

Menurut Danang, skor IPK menjadi panduan buat menilai kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi.

“Lagipula sejak masa Presiden SBY pun, IPK dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberantasan korupsi,” ujar Danang.

TII sebelumnya merilis IPK/CPI Indonesia pada 2022 yang menurun 4 poin

menjadi 34. Selain itu, Indonesia berada di posisi ke 110, atau turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan, dalam pengukuran CPI, pihaknya menggunakan sembilan indikator. Sebanyak poin tiga indikator, tiga stagnan, dan dua indikator mengalami kenaikan. Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah political risk service (PRS) international country risk guide atau risiko politik.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan IPK Indonesia pada 2022 yang dirilis TII hanya sekadar persepsi.

“Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta, tapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak mempermasalahkan turunnya skor IPK Indonesia tersebut. Sebab, penilaian masing-masing

negara dalam mengukur IPK berbeda-beda. Selain itu, hampir semua negara mengalami penurunan IPK, di antaranya Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam.

“Tapi enggak apa-apa itu hak dari TII untuk membuat agregasi, dan kami menghargai upaya TII sebagai persepsi,” ucap Mahfud.

“Itu bukan fakta, sehingga kami perbaikan juga dari sudut persepsi. Berterima kasih kami kepada TII,” ujar Mahfud.

Salah satu caranya memperbaiki peraturan perundang-undangan yang dinilai berkontribusi pada penurunan IPK Indonesia.

“Korupsi politik dan conflict of interest di mana politisi ikut ke bisnis, pejabat ikut menentukan bisnis punya perusahaan, punya saudara dan sebagainya, kan itu yang ditemukan oleh TII itu kan?” papar Mahfud.

“Jadi bahkan kadangkala proses pembuatan undang-undang pun tidak fair misalnya ya,” ujar Mahfud. ● han

## BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut Soal Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, perlu adanya investigasi lebih lanjut terkait indikasi pemalsuan obat sirup Praxion penyebab gagal ginjal akut (acute kidney injury atau AKI) pada anak.

Investigasi ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan penyebab dua kasus baru penyakit gagal ginjal pada anak yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

“Ini yang perlu investigasi lebih lanjut tentunya, kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa,” kata Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Togi Junice Hutadjudi di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Rabu (8/2).

Investigasi diperlukan lantaran tujuh sampel obat Praxion dan bahan baku yang diuji BPOM di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dinyatakan aman dikonsumsi sepanjang aturan pakai.

Tujuh sampel tersebut, di antaranya sampel sirup obat sisa pasien, sampel sirup dari peredaran, dan sampel sirup dari tempat produksi dengan nomor batch/bets yang sama dengan sampel yang dikonsumsi oleh pasien.

Kemudian sampel sirup dengan batch/bets yang berdekatan dengan sampel sirup sisa obat pasien, sampel bahan baku sorbitol yang digunakan dalam proses produksi, dan sampel sirup lain yang menggunakan bahan baku dengan nomor bets yang sama.

“Sampel dari sisa (obat) yang digunakan oleh pasien juga sudah diuji di labora-

torium BPOM dan hasilnya memenuhi syarat. Nah kemungkinan-kemungkinan ini yang harus ditindaklanjuti lebih lanjut,” tutur Togi.

Saat ini BPOM telah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi terhadap obat yang dikonsumsi pasien dengan merek Praxion pada tanggal 4 Februari 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka kehati-hatian dan langkah antisipatif.

Atas perintah tersebut, industri farmasi pemilik izin edar, PT Pharos Indonesia, telah melakukan penarikan obat secara sukarela (*voluntary recall*) pada tanggal 5 Februari 2023.

“Diharapkan dengan dilakukannya penarikan obat secara sukarela, obat itu sudah secara lengkap ditarik dari peredaran,” kata Togi.

Munculnya dua kasus baru gagal ginjal akut pada anak yang dilaporkan oleh Dinkes DKI Jakarta, terdiri dari satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek.

Kasus konfirmasi diketahui sempat mengonsumsi obat sirup merek Praxion. Dengan dilaporkannya tambahan kasus baru gagal ginjal, hingga 5 Februari 2023 tercatat 326 kasus gagal ginjal dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. ● mei

## KEHILANGAN

Telah hilang SERTIFIKAT ASLI SHM Nomor : 08873/Sukamaju atas nama DJADJA SUPARMAN yang beralamat di Kp.Sidamukti, Rt/Rw 05/02, Kel.Sukamaju, Kec.Sukamaju, Kota Depok. Surat Ukur tgl 16-11-1998 No.05080/Sukamaju/1998, Luas 167 M2. Pembuat Berita Kehilangan ENCEPANWAR.

## Amnesty Kecam Serangan ke Pesawat Sipil di Nduga, Desak KKB Bebaskan Sandera

JAKARTA (IM) - Lembaga advokasi hak asasi manusia Amnesty International Indonesia mengancam keras serangan terhadap warga dan pesawat sipil yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoyam, di Bandara Pari, Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (7/2).

Pihak Amnesty International Indonesia juga mendesak agar seluruh warga sipil dan warga asing yang disandera segera dibebaskan.

“Kami mengancam keras serangan terhadap warga dan obyek sipil di Papua. Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera segera dibebaskan dalam keadaan selamat,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melalui keterangan pers yang dikutip pada Rabu (8/2).

Usman meminta para pihak yang berkonflik menghormati hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Insiden

pembakaran pesawat dan penyangkutan itu menjadi bukti berulangnya aksi kekerasan di wilayah Papua, dan warga sipil kembali menjadi korbannya.

“Kami menyerukan adanya peninjauan ulang atas pendekatan keamanan yang selama ini dipilih oleh negara,” ujar Usman.

Diberitakan sebelumnya, pesawat Pilatus Porter milik maskapai Susi Air diduga dibakar selepas mendarat di Bandara Pari, Nduga, Papua Pegunungan Selasa (7/2) pagi.

Sementara Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen M. Saleh Mustafa memastikan, Pilot Susi Air PK-BVY, Philips Marthen (37), saat ini dibawa oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sedangkan 5 warga sipil yang menumpang pesawat itu yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W, sudah dievakuasi.

“(Pilot) Dibawa oleh kelompok EK (Egianus Kogoyam),” ujarnya melalui

pesan singkat.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo menyebutkan, saat ini 15 pekerja bangunan yang sempat diancam oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoyam dipisahkan aman.

Benny memastikan para pekerja bisa selamat karena mengamankan diri di salah satu rumah pendeta. Upaya evakuasi terhadap para pekerja, terang Benny, berjalan lancar tanpa ada gangguan dari pihak KKB.

“Sejauh ini tidak ada gangguan,” katanya.

Ke-15 pekerja tersebut adalah Gregorius Yanwarin, Domianus Wenehen, Thadeus Belyanan, Ical Behuku, Simon Walter, dan Martinus Yanwarin. Kemudian, Gerardus Ruban, Fransiskus Rendi Ruban, Yogi Parlahutan Siregar, Refalino Walten, Antonius Heatubun, Martinus Heatubun, Andreas Kolatena, Amatus Ruban, dan Walterius Emanuel Heatubun. ● lus



FOTO: ANI

## RAPAT KERJA MENSOS DENGAN KOMISI VIII DPR

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). Rapat tersebut membahas tentang pengawasan program bantuan sosial tahun 2022.